

Konsep Disiplin, Kekuasaan dan Normalisasi Sosial dalam Pendidikan melalui Pendekatan Teori Michel Foucault

Dewi Sulistyowati¹, Arif Sukino²
^{1,2}Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Indonesia

Histori Naskah

Diserahkan:
16-09-2025

Direvisi:
02-03-2026

Diterima:
03-03-2026

Keywords

ABSTRACT

This article aims to examine how the concepts of power, discipline, and social normalization in education are understood through the lens of Michel Foucault's theory. From a Foucauldian perspective, power is not merely repressive and centralized, but is rather diffuse, productive, and present in all social relations, including in educational practices. Through techniques of surveillance, evaluation, and the instillation of norms, education plays a strategic role in shaping subjects who are compliant with established social norms. This study employs a qualitative-descriptive method with a literature review approach, analyzing Foucault's major works and their implementation within the context of educational management in Indonesia. The findings indicate that educational practices function as an effective instrument of social control in shaping the consciousness, behavior, and identity of students.

: Michel Foucault, power, discipline, normalization, education, surveillance

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana konsep kekuasaan, disiplin, dan normalisasi sosial dalam pendidikan dipahami melalui pendekatan teori Michel Foucault. Dalam perspektif Foucault, kekuasaan tidak bersifat represif dan terpusat, melainkan tersebar, produktif, dan hadir dalam setiap relasi sosial, termasuk dalam praktik pendidikan. Melalui teknik pengawasan, evaluasi, dan penanaman norma, pendidikan memainkan peran strategis dalam membentuk subjek yang patuh dan sesuai dengan norma-norma sosial yang ditetapkan. Kajian ini bersifat kualitatif-deskriptif dengan pendekatan studi pustaka terhadap karya-karya utama Foucault serta implementasinya dalam konteks pengelolaan pendidikan di Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa praktik pendidikan berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang efektif dalam membentuk kesadaran, perilaku, dan identitas peserta didik.

Kata Kunci : Michel Foucault, kekuasaan, disiplin, normalisasi, pendidikan, pengawasan

Corresponding Author : Dewi Sulistyowati, e-mail: sulistyowatidewi1984@gmail.com

PENDAHULUAN

Pemerintah saat ini tengah mendorong terwujudnya transformasi digital dalam dunia pendidikan. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas proses belajar mengajar. Namun, dalam perspektif kritis, transformasi digital tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran pengetahuan. Pendidikan juga berperan sebagai instrumen pembentukan subjek yang selaras dengan norma-norma sosial yang dominan. Melalui penerapan teknologi dan sistem pengawasan digital, kekuasaan bekerja secara halus di dalam ruang-ruang pendidikan. Mekanisme ini pada akhirnya membentuk identitas, perilaku, dan kesadaran individu secara efektif meskipun tidak selalu disadari (Ball, 2012).

Michel Foucault, seorang filsuf dari Prancis, mengatakan bahwa kekuasaan dalam masyarakat modern tidak hanya bekerja dengan cara melawan, melainkan melalui teknik-teknik yang halus yang membentuk orang secara internal. Dalam bukunya *Discipline and Punish* (1977), Foucault menyatakan bahwa "kekuasaan menghasilkan; ia menghasilkan realitas, domain objek, dan ritual kebenaran" (Foucault, 1977). Maksudnya, kekuasaan bukan hanya menindas, tetapi juga menciptakan pengetahuan, norma, dan identitas melalui cara-cara disipliner yang terstruktur. Dalam konteks pendidikan, cara ini berupa pengawasan, penilaian standar, dan ujian yang semuanya berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan tubuh dan pikiran siswa (Addina & Hanif, 2025).

Menurut Foucault, sekolah adalah bagian dari "lembaga disipliner" yang juga mencakup penjara, rumah sakit, dan tempat tinggal militer. Melalui struktur waktu (jadwal), ruang (aturan penempatan di kelas), bentuk tubuh (aturan berpakaian dan cara duduk), serta cara evaluasi (ujian dan nilai), pendidikan secara perlahan membentuk individu yang patuh, efisien, dan sesuai dengan standar tertentu. "Disiplin menghasilkan individu yang terlatih; ia membedakan, menilai, membandingkan, dan menormalkan" (Foucault, 1977). Oleh karena itu, pendidikan bukan hanya tempat netral untuk membekali pengetahuan, tetapi juga arena penting di mana kekuasaan bekerja secara tersembunyi namun teratur untuk membentuk individu dan mengatur masyarakat (Addina & Hanif, 2025).

Penyeragaman kurikulum, sistem penilaian, pengawasan belajar, dan mekanisme evaluasi standar semua menjadi bagian dari cara kekuasaan memengaruhi pembentukan siswa. Devi & Alfiandra (2024) dalam bukunya *Pembelajaran Berdiferensiasi...* menunjukkan bahwa kurangnya kemampuan sistem pendidikan untuk menyesuaikan diri dengan gaya belajar, minat, dan karakteristik siswa menyebabkan minimnya layanan yang diberikan pada potensi yang berbeda. Mereka menekankan bahwa tanpa diferensiasi, beberapa siswa akan terabaikan dalam kelas.

Kritik terhadap sistem ini penting agar pendidikan tidak hanya menciptakan kepatuhan yang datar, tetapi juga melahirkan kemampuan berpikir kritis. Seperti yang dikatakan Gore (1990), "pendidikan yang tidak reflektif biasanya mengulangi kekuasaan dalam bentuk yang tidak disadari oleh guru maupun siswa." Oleh karena itu, pendekatan Foucault memberikan alat untuk menganalisis cara kekuasaan bekerja melalui kebiasaan-kebiasaan yang tampak biasa, namun secara nyata memengaruhi cara seseorang membangun identitas dan cara berpikir.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara kritis bagaimana gagasan kekuasaan, disiplin, dan normalisasi dalam teori Michel Foucault dapat digunakan untuk memahami bagaimana institusi pendidikan mengelola siswanya. Dengan mengkaji hal ini, diharapkan muncul pemahaman bahwa pendidikan bisa menjadi sarana untuk kebebasan jika mekanisme kekuasaan di dalamnya diakui, dievaluasi, dan dihadapi secara kritis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi teoritis terhadap konsep kekuasaan Michel Foucault serta penerapannya dalam konteks praktik pengelolaan pendidikan di Indonesia. Sumber data terdiri dari literatur primer dan sekunder, meliputi karya utama Foucault seperti *Discipline and Punish* dan *The History of Sexuality*, serta studi kontemporer dari jurnal, buku, dan artikel ilmiah yang relevan mengenai praktik kekuasaan dan pendidikan. Literatur tentang kebijakan pendidikan di Indonesia juga digunakan untuk menggambarkan kondisi empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pencarian sistematis terhadap pustaka yang berkaitan dengan Teori kekuasaan Foucault, konsep disiplin dan pengawasan (*panoptikon*), studi sebelumnya mengenai kekuasaan dalam institusi Pendidikan, dan kebijakan dan praktik manajemen pendidikan di Indonesia. Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif-kritis, yaitu mendeskripsikan konsep-konsep utama dari teori Foucault dan mengkaji secara kritis relevansinya terhadap konteks pengelolaan pendidikan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menggali bagaimana mekanisme kekuasaan bekerja dalam praktik pendidikan serta bagaimana pemahaman ini dapat memperkaya kajian kritis terhadap sistem pendidikan nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kekuasaan Sebagai Relasi Sosial yang Menyeluruh

Michel Foucault mengusulkan cara pemahaman yang baru tentang kekuasaan. Berbeda dengan pendapat lama yang menganggap kekuasaan hanya dimiliki oleh pemerintah atau kalangan elite dan bersifat keras, Foucault melihat kekuasaan sebagai sesuatu yang saling terkait, menyebar, dan hadir di setiap bagian kehidupan masyarakat. Kekuasaan bukanlah sesuatu yang tetap, melainkan proses yang terus berubah, menghasilkan kebenaran, dan membentuk cara berpikir serta berperilaku orang (Foucault, 1978). Pandangan ini didukung oleh Nikolas Rose yang menekankan bahwa dalam masyarakat modern, kekuasaan berjalan melalui cara-cara mengelola diri sendiri (*governmentality*), di mana setiap orang secara aktif menerima norma-norma sosial dan terlibat dalam mengatur diri sesuai dengan aturan kekuasaan yang tersembunyi dalam kehidupan sehari-hari (Irene, 2023). Menurut Foucault (1978), “kekuasaan ada di mana-mana bukan karena semua hal dikendalikan oleh satu pusat, melainkan karena kekuasaan datang dari segala arah.” Ini berarti bahwa kekuasaan tidak hanya ditemukan dalam institusi politik formal seperti negara, tetapi juga hadir dalam relasi sehari-hari: antara guru dan murid, orang tua dan anak, bahkan antara sesama individu dalam komunitas. Kekuasaan dijalankan melalui wacana, kebijakan, dan praktik sosial yang tampak biasa, namun sesungguhnya mengatur dan mengarahkan perilaku. Sejalan dengan pandangan ini, Lauren Berlant (2011) menambahkan bahwa kekuasaan juga beroperasi dalam ranah emosional dan afektif, membentuk cara individu merasakan dan menghubungkan diri dengan lingkungan sosialnya, sehingga kekuasaan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga produktif dalam menciptakan norma dan identitas yang terus berubah.

Dalam dunia pendidikan, kekuasaan hadir secara tersembunyi namun teratur, misalnya dalam kurikulum, peraturan sekolah, standar penilaian, sistem sertifikasi, hingga hubungan antar manusia di dalam kelas. Pernyataan ini sesuai dengan Ball (2013) yang mengatakan bahwa “institusi pendidikan bukanlah tempat yang netral, melainkan tempat strategis di mana kekuasaan berjalan, dihadapi, dan dipertahankan.” Kurikulum, contohnya, tidak hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi juga mengandung kekuasaan yang menentukan apa yang pantas dipelajari, siapa yang dianggap ahli, dan siapa yang berhak mengajarkan. Selain itu, kekuasaan dalam pendidikan juga beroperasi di tingkat mikro, yaitu kekuasaan yang bekerja secara detail pada tubuh dan perilaku seseorang. Foucault menyebutnya sebagai mikrofisika

kekuasaan, yaitu cara kekuasaan dijalankan secara halus dan terperinci melalui aturan tentang cara berpakaian, posisi duduk, gerakan tubuh, serta ritme kegiatan sehari-hari (Foucault, 1977). Kekuasaan semacam ini tidak didasarkan pada paksaan fisik, tetapi melalui pembentukan kebiasaan, pengawasan, dan sistem evaluasi yang membuat seseorang secara sukarela menyesuaikan diri dengan norma. Menurut Ball (2003), dalam sistem pendidikan modern, kekuasaan mikro ini semakin kuat karena praktik manajemen sekolah dan kebijakan pendidikan yang fokus pada pengukuran kinerja dan akuntabilitas, sehingga kontrol terhadap siswa dan guru semakin sistematis dan terstruktur berkat birokrasi serta teknologi penilaian. Lebih jauh, kekuasaan dalam perspektif Foucault bersifat produktif, bukan sekadar membatasi. Ia menciptakan pengetahuan, membentuk kategori sosial, dan mendefinisikan siapa yang dianggap “normal” atau “menyimpang”.

Dalam dunia pendidikan, hal ini tampak dari bagaimana sistem pendidikan mendefinisikan peserta didik “berprestasi”, “bermasalah”, atau “tidak layak”, dan bagaimana label tersebut memengaruhi identitas serta peluang peserta didik di masa depan (Popkewitz, 1987). Dengan demikian, pendidikan menjadi sarana penting dalam mendistribusikan kekuasaan secara tidak langsung dan terlegitimasi. Foucault juga mengaitkan kekuasaan dengan pengetahuan melalui konsep *power/knowledge*. Menurutnya, "tidak ada hubungan kekuasaan tanpa pembentukan suatu bidang pengetahuan, dan tidak ada pengetahuan yang tidak memerlukan atau tidak membentuk relasi kekuasaan" (Foucault, 1977). Dalam konteks pendidikan, hal ini berarti bahwa orang yang memiliki otoritas menentukan apa yang dianggap sebagai pengetahuan sah, juga memiliki kekuasaan dalam membentuk cara berpikir siswa. Guru, buku pelajaran, dan sistem penilaian menjadi alat kekuasaan yang menentukan batas-batas kebenaran di dalam kelas. Dengan memahami kekuasaan sebagai hubungan sosial yang luas, kita bisa menyadari bahwa pendidikan tidak hanya tempat belajar, tetapi juga tempat terjadinya konflik simbolik, tempat terjadi pertarungan nilai, identitas, dan otoritas. Kekuasaan tidak selalu terlihat dengan jelas, namun bekerja dalam jaringan praktik sosial yang saling terkait dan dalam.

B. Disiplin sebagai Teknologi Kekuasaan

Dalam pandangan Michel Foucault, disiplin bukan hanya cara memberi hukuman atas kesalahan, melainkan merupakan alat kekuasaan yang dibuat untuk mengatur sikap, tubuh, dan pikiran seseorang secara teratur. Disiplin bekerja tanpa langsung menghukum, melainkan melalui cara mengatur ruang, waktu, gerakan tubuh, serta sistem pengawasan yang membuat seseorang patuh sendiri. Dalam bukunya *Discipline and Punish* (1977), Foucault menegaskan bahwa "disiplin membuat individu; ini teknik khusus kekuasaan yang melihat individu sebagai objek dan alat untuk digunakan" (Foucault, 1977). Disiplin bukan hanya mengontrol seseorang dari luar, tetapi juga membentuk diri seseorang untuk mengontrol dirinya sendiri dari dalam. Menurut Ball (2003), dalam konteks pendidikan modern, disiplin berkembang menjadi bentuk performatif, di mana tekanan untuk menunjukkan hasil dan memenuhi standar mengarah pada seseorang tidak hanya terkontrol oleh aturan luar, tetapi juga terdorong untuk menginternalisasi norma dan menilai diri secara terus-menerus. Hal ini menunjukkan bagaimana kekuasaan disipliner terus berkembang dalam bentuk yang semakin halus dan rumit. Dalam konteks pendidikan, bentuk teknologi disipliner dapat dilihat dari cara sekolah mengatur kegiatan siswa secara rinci dan ketat, mulai dari pengaturan waktu (jadwal pelajaran), ruang (pembagian kelas, tempat duduk), serta peraturan terhadap tubuh siswa (pakaian, gerakan, cara berbicara).

Disiplin juga muncul dalam bentuk seperti catatan kehadiran, inspeksi perlengkapan, aturan seragam, larangan membawa barang tertentu, hingga sistem poin perilaku. Semua hal ini termasuk dalam cara praktik kekuasaan yang mendorong norma dan kontrol masuk ke dalam tubuh siswa.

Foucault mengidentifikasi tiga mekanisme utama dalam sistem disipliner modern: pengawasan, penilaian normatif, dan ujian (Foucault, 1977). Ketiganya bekerja bersamaan untuk menciptakan individu yang teratur dan patuh.

1. Pengawasan: Sekolah dirancang sedemikian rupa agar bisa terus-menerus memantau siswa, baik oleh guru, petugas, maupun alat teknologi seperti kamera CCTV. Dalam banyak situasi, hal ini menciptakan efek panoptik, yaitu keadaan di mana siswa merasa selalu diawasi, sehingga mereka cenderung mengatur sendiri perilaku mereka tanpa perlu ada pengawas di samping. Seperti kata Foucault, “visibility is a trap” (1977). Ketika seseorang merasa diawasi, ia akan menginternalisasi kontrol itu sendiri dan menyesuaikan perilaku.
2. Penilaian normatif : Disiplin bekerja dengan menetapkan standar perilaku yang dianggap normal dan diinginkan, kemudian menilai seseorang berdasarkan sejauh mana ia mematuhi standar tersebut. Siswa dinilai sebagai siswa yang baik atau buruk, aktif atau pasif, sesuai dengan norma yang ditetapkan. Hal ini membentuk kategori-kategori sosial yang menempel pada identitas siswa, serta memengaruhi cara mereka diperlakukan.
3. Ujian : Ujian menggabungkan dua hal sebelumnya, yaitu pengawasan dan penilaian, menjadi sistem klasifikasi yang kuat. Ujian tidak hanya mengukur ilmu pengetahuan, tetapi juga menilai nilai moral, produktivitas, dan “kelayakan” seseorang dalam mengisi peran tertentu dalam sistem sosial. Seperti yang diungkapkan Foucault, “the examination combines the techniques of an observing hierarchy and those of a normalizing judgment” (1977). Melalui mekanisme ini, disiplin bekerja tidak dengan kekerasan fisik, tetapi dengan cara menciptakan tubuh yang “taat”, produktif, dan efisien sesuai dengan kebutuhan sistem. Di sinilah letak kekuasaan modern yang paling efektif: kekuasaan yang bekerja melalui kepatuhan sukarela, bukan paksaan terbuka. Dalam pendidikan, bentuk-bentuk kontrol ini sering kali dibungkus dengan istilah “pembentukan karakter”, “penanaman kedisiplinan”, atau “pembelajaran nilai-nilai positif”, padahal pada hakikatnya adalah bagian dari mekanisme kekuasaan yang menyangkut tubuh dan kesadaran peserta didik.

Di Indonesia, bentuk-bentuk teknologi disipliner terlihat jelas di berbagai lembaga pendidikan, seperti wajib ikut upacara setiap hari Senin, pemeriksaan kebersihan dan kelengkapan seragam, sistem poin pelanggaran, hingga penempatan kursi berdasarkan skor dan perilaku siswa. Tujuan utamanya adalah menciptakan ketertiban, tetapi hal ini juga memicu pertanyaan: apakah yang dihasilkan adalah kepatuhan yang benar-benar menyadari, atau hanya ketaatan yang dilakukan secara rutin tanpa pemahaman? Seperti dijelaskan oleh Dreyfus dan Rabinow (1982), “mekanisme disipliner tidak hanya menekan, tetapi juga membentuk dan menciptakan perilaku, serta menciptakan kerangka normatif yang menentukan apa yang bisa atau tidak boleh dilakukan.” Oleh karena itu, penting untuk memahami disiplin sebagai bentuk teknologi kekuasaan secara kritis agar pendidikan tidak hanya menghasilkan individu yang patuh, tetapi juga yang memiliki pemikiran kritis, sadar, dan mandiri).

C. Ujian dan Evaluasi sebagai Instrumen Normalisasi

Dalam pandangan Michel Foucault, ujian bukan sekadar cara mengukur kemampuan belajar, tetapi juga bagian dari cara kekuasaan mengatur dan memperbaiki perilaku orang. Menurut Foucault, ujian adalah “teknik yang menggabungkan pengawasan dan penilaian dalam satu bentuk mekanisme kekuasaan yang halus” (Foucault, 1977). Dengan demikian, ujian bukan hanya alat teknis, tetapi juga alat yang membentuk dan mengontrol cara seseorang berpikir dan berperilaku. Di dalam dunia pendidikan, ujian dan penilaian merupakan hal yang sehari-hari dan dianggap biasa.

Namun sebenarnya, seperti yang dijelaskan oleh Ball (2013), ujian ini tetap dipengaruhi oleh kekuasaan. Dengan ujian, siswa dikelompokkan, diberi peringkat, dan dibandingkan dengan

standar tertentu yang sudah ditentukan sebelumnya. Proses ini membentuk sistem nilai yang menciptakan kategori seperti “berprestasi”, “boleh”, atau “tidak bisa”, yang berdampak pada perlakuan dan peluang yang diberikan kepada siswa. Foucault menjelaskan bahwa ujian adalah bentuk di mana seseorang dianggap sebagai objek informasi dan subjek yang dicatat. Ini berarti bahwa hasil ujian tidak hanya menunjukkan level kemampuan, tetapi juga menciptakan arsip yang mengikuti, menggambarkan, dan bahkan memprediksi masa depan seseorang (Foucault, 1977). Dengan demikian, ujian tidak hanya menilai, tetapi juga mengatur dan mengontrol bagaimana seseorang berperan di dalam masyarakat.

Di Indonesia, ujian seperti Ujian Sekolah (US), Penilaian Akhir Semester (PAS), dan lainnya diberikan untuk menentukan kenaikan kelas, kelulusan, atau persyaratan masuk jenjang berikutnya. Masalahnya, dalam banyak kasus, ujian hanya menekankan pada kemampuan kognitif yang seragam, dan mengabaikan aspek emosional, sosial, dan konteks siswa. Dampaknya, makna keberhasilan dalam pendidikan semakin sempit, hanya diukur melalui skor angka. Selain itu, sistem evaluasi juga membentuk efek normalisasi, yaitu proses di mana individu menyesuaikan diri dengan standar tertentu agar bisa diakui dalam sistem.

Gore (1993) menyebutnya sebagai “regime of truth”, yaitu cara pengetahuan dan nilai disusun secara terstruktur untuk menentukan siapa yang benar, siapa yang salah, dan siapa yang layak diterima. Proses ini sering kali tidak disadari siswa atau guru, tetapi sangat memengaruhi cara identitas dan peran sosial siswa terbentuk. Popkewitz (1987) mengingatkan bahwa evaluasi berdasarkan standar bisa menciptakan “struktur eksklusif”, di mana murid yang tidak memenuhi standar dianggap sebagai masalah yang perlu diperbaiki atau dikoreksi. Jika ini terus berlangsung, maka ketimpangan sosial dan pendidikan bisa semakin dalam, terutama bagi murid yang memiliki latar belakang ekonomi, budaya, atau kemampuan yang berbeda. Akibatnya, pendidikan bisa jadi alat yang mempertahankan kondisi yang ada, bukan tempat untuk perubahan dan kebebasan.

Oleh karena itu, mengerti bahwa ujian dan evaluasi adalah alat normalisasi mengajak para guru dan pemangku kepentingan pendidikan untuk berpikir kritis. Evaluasi tidak hanya boleh digunakan untuk mengklasifikasikan dan mengendalikan murid, tetapi juga sebagai alat yang mendorong potensi beragam murid. Sistem penilaian yang lebih fleksibel, sesuai konteks, dan melibatkan partisipasi bisa menjadi alternatif untuk melawan dominasi pola pikir yang terlalu kaku.

D. Pendidikan sebagai Alat Normalisasi Sosial

Dalam pendekatan Michel Foucault, pendidikan bukan hanya sekadar tempat meneruskan pengetahuan, tetapi juga alat untuk mengatur masyarakat. Melalui cara mengawasi, mengatur, dan menilai, pendidikan membentuk orang-orang agar sesuai dengan standar dan norma yang dibuat oleh pihak berkuasa. Proses ini terjadi secara perlahan, melalui kebijakan dan tindakan sehari-hari yang terlihat biasa, tetapi sebenarnya mengandung gagasan yang kuat. Menurut Ball (2003), pendidikan modern dipengaruhi oleh tekanan untuk menunjukkan hasil, sehingga sekolah dan guru menyusun cara mengajar yang menghasilkan orang-orang yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan pemerintah. Apple (2013) menyatakan bahwa pendidikan adalah tempat menjaga gagasan dominan yang menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi melalui materi pelajaran dan standar yang diterapkan. Biesta (2004) mengingatkan bahwa evaluasi dan tanggung jawab bisa membatasi potensi pendidikan sebagai ruang untuk mengembangkan diri dan membentuk orang yang kritis. Giroux (2007) menunjukkan bahwa sistem neoliberal telah mengubah pendidikan menjadi cara mengelola individu dengan fokus pada efisiensi dan kompetisi, bukan pada kebebasan sosial. Ball dan Olmedo (2013) berpendapat bahwa kebijakan

pendidikan merupakan bentuk kekuasaan yang menyebar luas, memengaruhi kehidupan guru dan murid melalui cara mengawasi yang terstruktur dan terbiasa.

Foucault menjelaskan bahwa normalisasi adalah cara kekuasaan menciptakan standar apa yang dianggap “normal”, lalu mengukur dan memperbaiki individu berdasarkan standar tersebut. “Kekuasaan normalisasi menimbulkan keseragaman, tetapi juga memperkecil perbedaan dengan membuatnya bisa diukur, menentukan tingkat, menetapkan spesialisasi, dan memperbaiki perbedaan dengan saling cocok.” (Foucault, 1977). Artinya, pendidikan tidak hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi juga mengatur cara hidup, cara berpikir, bahkan cara seseorang memandang dirinya sendiri. Normalisasi sosial dalam pendidikan terjadi melalui berbagai cara: mulai dari materi pelajaran yang mengarahkan cara berpikir siswa, hingga nilai dan perilaku yang diharapkan dari siswa.

Aktivitas seperti menilai, memberi label (misalnya “berprestasi” atau “bermasalah”), hingga kebijakan seragam sekolah semuanya menjadi bagian dari proses menciptakan individu yang patuh terhadap norma sosial yang berlaku. Dalam konteks ini, pendidikan berfungsi sebagai “mesin ideologis negara” (Althusser, 1971) yang menghasilkan individu yang berada di bawah kontrol tatanan dominan tanpa perlu paksaan langsung.

Lebih lanjut, Foucault menekankan bahwa normalisasi tidak selalu terasa oleh seseorang sebagai bentuk kekuasaan karena ia bekerja melalui proses internalisasi. Peserta didik belajar untuk mengawasi diri sendiri, menyesuaikan perilaku tanpa disuruh, dan menganggap norma-norma sebagai bagian dari diri mereka sendiri. Hal ini menciptakan apa yang disebut Foucault sebagai subjek yang diatur, yaitu individu yang terbentuk oleh dan tunduk pada jaringan kekuasaan yang masuk ke dalam kesadaran serta identitasnya.

Di Indonesia, mekanisme normalisasi sosial dalam pendidikan bisa dilihat dari berbagai aspek. Misalnya, kurikulum yang sama di setiap sekolah, sistem penilaian berbasis angka, serta aturan sekolah yang mengendalikan ekspresi identitas pribadi. Praktik-praktik ini tidak hanya mengontrol perilaku, tapi juga menentukan siapa yang dianggap “baik”, “normal”, atau “berhasil”. Orang yang tidak sesuai dengan norma ini sering kali ditinggalkan, baik secara akademik, sosial, maupun psikologis (Pratama, 2021). Seperti yang dikemukakan Popkewitz (1987), pendidikan modern sering kali berperan sebagai “alat pemilai sosial” yang menyaring dan mengelompokkan individu berdasarkan sejauh mana mereka sesuai dengan norma yang mendominasi.

Hal ini membuat pendidikan bukan lagi ruang untuk membebaskan, melainkan sarana pengendalian sosial yang justru memperkuat ketimpangan dan diskriminasi. Dalam konteks ini, penting bagi para pendidik dan pengambil kebijakan untuk menyadari bahwa praktik pendidikan tidak pernah objektif. Mereka selalu membawa nilai dan kekuasaan tertentu yang perlu dianalisis secara kritis. Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya menyiapkan keterampilan akademik, tetapi juga membantu peserta didik memahami struktur sosial di mana mereka tinggal. Pendidikan yang membebaskan, sebagaimana dikembangkan oleh Paulo Freire (1970), justru lebih menekankan dialog, kesetaraan, dan pemikiran kritis, bukan hanya menyebarkan norma yang sudah ada. Transformasi menuju pendidikan yang lebih inklusif dan reflektif memerlukan pergeseran dari paradigma pengendalian menuju paradigma pemberdayaan.

D. Impikasi dalam Pengelolaan Pendidikan

Pemikiran Michel Foucault mengenai kekuasaan, disiplin, dan normalisasi mempunyai dampak besar terhadap cara kita memahami dan mengelola lembaga pendidikan. Dalam pendekatan Foucault, pengelolaan pendidikan tidak bisa dipisahkan dari mekanisme kekuasaan yang bekerja melalui struktur dan rutinitas harian. Oleh karena itu, pengelolaan pendidikan tidak hanya bersifat administratif dan teknis, tetapi juga ideologis, karena terkait dengan nilai-nilai,

kepentingan, serta hubungan kekuasaan yang membentuk identitas peserta didik. Menurut Ball (2003), kebijakan pendidikan kerap kali bertindak sebagai alat kekuasaan yang mendorong performa dan pertanggungjawaban, sehingga membentuk sikap dan perilaku guru dan murid berdasarkan standar yang ketat. Biesta (2004) menambahkan bahwa pendidikan berperan dalam membentuk individu yang 'teratur' oleh norma-norma sosial dan budaya, sehingga tidak lepas dari proses normalisasi.

Giroux (2005) mengingatkan bahwa kekuasaan dalam pendidikan terlibat dengan ideologi neoliberal yang menekankan kompetisi dan individualisme, yang bisa mengabaikan aspek kritis dan mengemukakan pendidikan. Selain itu, Apple (2013) menyatakan bahwa pendidikan adalah tempat pertarungan antara kelas dan ideologi, di mana kekuasaan digunakan untuk mempertahankan struktur sosial yang sudah ada. Terakhir, Davies dan Bansel (2007) menekankan bahwa manajemen pendidikan menciptakan individu yang dilabeli melalui teknologi kekuasaan yang halus seperti pengawasan dan penilaian kinerja, yang menginternalisasi norma-norma dan membatasi potensi bebas individu. Foucault (1977) menekankan bahwa kekuasaan tidak hanya berada di puncak hierarki, tetapi juga tersebar dalam jaringan hubungan sosial. Dalam konteks pendidikan, kepala sekolah, guru, kurikulum, aturan, sistem penilaian, hingga desain ruang kelas merupakan bagian dari elemen yang mereproduksi kekuasaan. Oleh karena itu, para pemimpin pendidikan perlu menyadari bahwa setiap keputusan kebijakan dan tindakan teknis mempunyai dampak terhadap pembentukan identitas, perilaku, dan posisi sosial peserta didik.

1. Kekuasaan dalam Pengambilan Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan biasanya dianggap netral dan objektif, padahal menurut pandangan Foucault, kebijakan ini sebenarnya merupakan hasil dari suatu wacana yang menentukan apa yang dianggap benar dan siapa yang berhak mengaksesnya. Misalnya, kurikulum tidak hanya menyajikan materi pelajaran, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai dominan yang ditanamkan kepada siswa. Karena itu, para pengelola pendidikan perlu memahami secara kritis ketika merancang dan menerapkan kebijakan, agar bisa memastikan kebijakan tersebut inklusif, memberdayakan, dan mampu melayani keberagaman siswa.

2. Disiplin dalam Tata Kelola Harian Sekolah

Disiplin di sekolah biasanya dipahami sebagai ketertiban atau ketaatan terhadap peraturan. Tapi, menurut Foucault, disiplin itu sebenarnya adalah cara kekuasaan yang bekerja lewat pengawasan, pengaturan waktu, pengorganisasian ruang, dan mengendalikan tubuh. Dalam praktiknya, hal itu terlihat dari kehadiran yang tidak teratur, aturan yang diberlakukan, barisan yang rapi, system poin perilaku, dan pemeriksaan rutin. Jika dijalankan dengan cara yang kaku dan otoriter, sistem ini bisa membuat siswa hanya patuh secara luar biasa, tetapi justru menghambat kreativitas mereka. Karenanya, sistem pendidikan perlu berubah dari pendekatan kontrol menjadi pendekatan yang mendorong kesadaran etis, serta partisipatif dan reflektif.

3. Evaluasi seperti ujian, penilaian sikap, dan peringkat akademik memiliki dimensi kekuasaan yang kuat.

Mereka tidak hanya mengukur, tetapi juga menilai, mengklasifikasikan, dan memberi label sosial. Dalam konteks ini, evaluasi berperan sebagai alat normalisasi yang bisa menyebabkan stigma terhadap siswa yang tidak sesuai dengan standar dominan. Oleh karena itu, sistem pendidikan perlu mempertimbangkan alternatif evaluasi yang lebih adil dan sesuai konteks, seperti penilaian berbasis portofolio, refleksi diri, atau asesmen yang lebih menghargai proses, bukan hanya hasil akhir.

4. Sistem normalisasi dalam pendidikan sering menciptakan keseragaman dan mengabaikan keragaman.

Model manajemen sekolah yang terlalu sentralistik dan seragam bisa mengabaikan siswa dengan latar belakang sosial, budaya, atau gaya belajar yang berbeda. Untuk itu, pendidikan harus membuka ruang bagi kebebasan belajar dan menghargai perbedaan. Freire menyarankan bahwa pendidikan seharusnya menjadi ruang dialog dan kesetaraan, bukan hanya pihak yang menguasai. Maka, penting untuk mendorong model pengelolaan yang lebih demokratis dan partisipatif.

5. Kepala sekolah dan guru bukan hanya pelaksana kebijakan, tetapi juga bagian dari wacana dan pelaku kekuasaan.

Dalam posisi ini, mereka memiliki tanggung jawab untuk tidak memperkuat struktur yang tertindas, tetapi justru memfasilitasi pembebasan siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat Gore yang menekankan pentingnya "pedagogi reflektif" yang peka terhadap dimensi kekuasaan dalam praktik pendidikan. Dengan demikian, penerapan teori Foucault dalam pengelolaan pendidikan memberi peluang untuk meninjau kembali praktik-praktik pendidikan yang selama ini dilakukan tanpa pertanyaan. Pemahaman yang mendalam tentang disiplin, kekuasaan, dan normalisasi bisa membantu menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil, inklusif, dan transformasional. Alih-alih menjadi alat pengendalian, pendidikan seharusnya menjadi ruang untuk pembebasan, serta membangun siswa yang otonom, kritis, dan berdaya.

PENUTUP

Pendidikan tidak bisa dipisahkan dari mekanisme kekuasaan yang bekerja secara rumit dan tersembunyi dalam kegiatan sehari-hari. Kekuasaan ini bekerja melalui cara-cara seperti disiplin, pengawasan, evaluasi, serta membentuk norma yang membentuk cara berpikir dan bertindak peserta didik. Konsep disiplin dalam pendidikan tidak bisa dimaknai secara sederhana hanya sebagai penerapan aturan.

Disiplin adalah alat kekuasaan yang mengatur tubuh, waktu, ruang, serta perilaku seseorang. Sekolah sebagai lembaga sosial berperan penting dalam proses ini, membentuk individu yang patuh, baik secara fisik, mental, maupun secara ideologi. Dengan pengawasan dan penerimaan norma, peserta didik belajar untuk mengatur diri sendiri dan menyesuaikan diri dengan standar sosial yang sudah ditetapkan. Selain itu, evaluasi dan ujian bukan hanya bentuk alat pengajaran, tetapi juga alat untuk mengklasifikasikan dan menormalkan.

Sistem penilaian yang seragam dan berbasis angka berkontribusi pada pembentukan hierarki sosial yang membedakan antara peserta didik yang dianggap normal dan yang menyimpang, berprestasi dan bermasalah. Jika dibiarkan terus-menerus, proses ini akan memperkuat struktur sosial yang menyisihkan sebagian kelompok dan membatasi ruang bagi berbagai potensi peserta didik. Dalam kerangka ini, pendidikan berfungsi sebagai alat untuk menormalkan individu agar sesuai dengan nilai-nilai yang mendominasi masyarakat.

Institusi pendidikan menjadi tempat di mana subjek-subjek yang patuh, teratur, dan sesuai dengan struktur sosial yang sudah ada dihasilkan. Maka, pendidikan bukanlah netral, melainkan ruang yang penuh dengan politik, ideologi, dan strategi dalam pertarungan ide dan kekuasaan. Oleh karena itu, pengelolaan pendidikan tidak cukup hanya fokus pada aspek teknis dan administratif. Diperlukan pendekatan kritis dan reflektif dalam meninjau ulang kurikulum, sistem evaluasi, serta praktik disiplin dalam sekolah. Pengelola, guru, dan pembuat kebijakan harus menyadari bahwa setiap praktik pendidikan memiliki isu kekuasaan, yang bisa memperkuat atau justru menantang struktur ketidakadilan sosial. Untuk itu, pendidikan harus diarahkan sebagai ruang bagi pembebasan, bukan hanya reproduksi norma, tetapi juga tempat dialog, keberagaman, dan pengembangan subjek yang otonom serta kritis. Pendekatan

emansipatoris dalam pendidikan penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang tidak hanya meningkatkan kecerdasan, tetapi juga mengembangkan sisi manusiawi peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Addina, N., & Hanif, M. (2025). Pendidikan dan Kekuasaan: Antara Pembebasan dan Dominasi Perspektif Michel Foucault, Pierre Bourdieu, dan Paulo Freire. *Jurnal Inovasi Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, 196-210. <http://jipipi.org/index.php/jipipi/article/view/64/65>
- Allen, A. (2018). *The power of feminist theory*. Routledge.
- Apple, M. W. (2012). *Can education change society?*. Routledge.
- Ball, S. J. (2003). The teacher's soul and the terrors of performativity. *Journal of education policy*, 18(2), 215-228.
- Ball, S. J. (2012). *Foucault, power, and education*. Routledge.
- Ball, S. J., & Olmedo, A. (2023). Care of the self, resistance and subjectivity under neoliberal governmentalities. In *Neoliberalism and education* (pp. 131-142). Routledge.
- Berlant, L. (2011). *Cruel optimism* Duke University Press. Durham NC.
- Biesta, G. J. (2004). Education, accountability, and the ethical demand: Can the democratic potential of accountability be regained?. *Educational theory*, 54(3), 233-250.
- Davies, B., & Bansel, P. (2007). Neoliberalism and education. *International journal of qualitative studies in education*, 20(3), 247-259.
- Dreyfus, H. L., & Rabinow, P. (2014). *Michel Foucault: Beyond structuralism and hermeneutics*. Routledge.
- Foucault, M. (1977). *Discipline and punish: The birth of the prison*, trans. Alan Sheridan (New York: Vintage, 1979), 227.
- Foucault, M. (1978). *The History of Sexuality, Volume 1* (New York. Pantheon, 157).
- Giroux, H. A. (2007). *Border crossings: Cultural workers and the politics of education*. Routledge.
- Gore, J. M. (1990). *The struggle for pedagogies: Critical and feminist discourses as regimes of truth*. The University of Wisconsin-Madison.
- Mustofa, M. "Sekolah sebagai Ruang Kekuasaan: Analisis Foucaultian atas Praktik Pendidikan." *Jurnal Pemikiran Pendidikan Islam*, Vol. 10, No. 1, 2022.
- Popkewitz, Thomas S. "Is the Pedagogy of Normalization a Contradiction?" *Educational Theory*, vol. 37, no. 2, 1987.
- Sutra Devi, W. H., & Alfiandra. (2024). Pembelajaran Berdiferensiasi sebagai Strategi Mengatasi Keberagaman Kemampuan dari Peserta Didik di SMP Negeri 51 Palembang dalam Rangka Mewujudkan Kurikulum Merdeka. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 10(04), 223–231. <https://doi.org/10.36989/didaktik.v10i04.4452>
- Rose, N. (2007). *The Politics of Life Itself: Biomedicine, Power, and Subjectivity in the Twenty-First Century*. Princeton University Press.
- Smart, Barry. *Michel Foucault*. London: Routledge, 1985.
- ZALUKHU, I. B. M. (2023). *Analisis Kritis Relasi Kuasa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa (Studi Tentang Kontradiksi Program Desa Maritim di Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa" APMD))*.